



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DIPERSIP TAHUN 2025



Jl. Jend. Sudirman No. 462
Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Pekanbaru
Kode Pos : 28126



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR **23** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 23

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

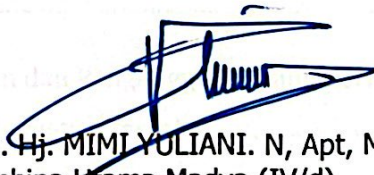
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Diharapkan nantinya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Pekanbaru,

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. Hj. MIMI YULIANI. N, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR.....	iii
TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
2.6 Kelompok Sasaran Layanan	46
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	49
3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	57
BAB V. PENUTUP.....	71
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	71
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	71
5.3 Rencana Tindak Lanjut	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan	
2.1	Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Provinsi Riau.....	13
Tabel	Realisasi Per program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun	
2.2	2022	17
Tabel	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan	
2.3	Kearsipan Provinsi Riau	22
Tabel	Renstra Perpusnas RI dan ANRI penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan	
2.4	dan Kearsipan	24
Tabel	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Dan	
2.5	Kearsipan Provinsi Riau.....	35
Tabel	Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	
2.6	Provinsi Riau.....	38
Tabel	Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	41
3.1		
Tabel	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju	
3.2	Tahun 2025 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis	52
Tabel	Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perpustakaan	
4.1	Dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Diagram Keterkaitan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

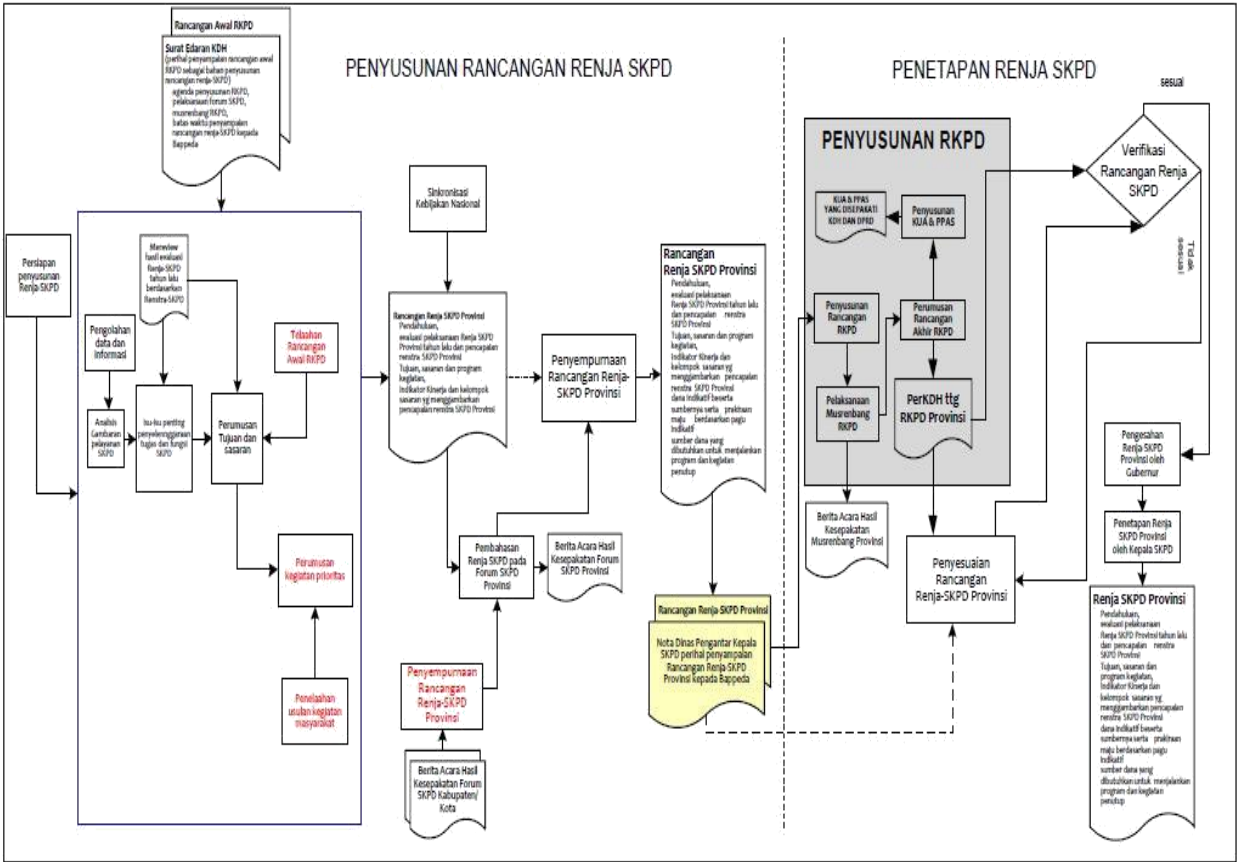
Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menyesuaikan dengan Inmendagri tersebut.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Riau, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau tahun 2025-2026 yang menitikberatkan pada Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan Tujuan 6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Gambar Diagram Proses Penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar 1.1 bawah ini:

Gambar 1.1
Diagram Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan
Persiapan penyusunan Renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang Pemerintah Provinsi Riau dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Renja PD Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

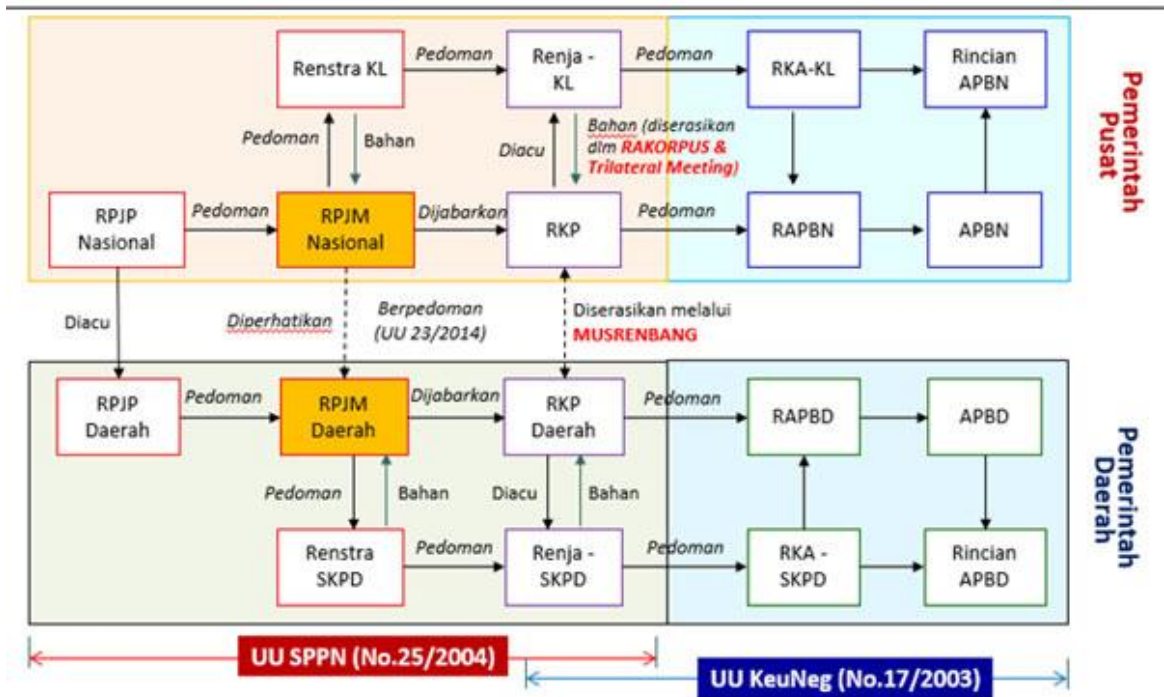
6. Penetapan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menyampaikan seluruh Renja PD Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada gambar 1.2 diagram berikut:

Gambar 1.2
Diagram Keterkaitan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L



Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dari Rancangan Awal Renja sampai Rncana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Rancangan Awal Renja PD, Rancangan Renja PD, Rancangan Akhir Renja PD dan RKPD.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada:

1. Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Ranwal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan RKPD. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Ranwal RKPD. Ranwal Renja PD tersebut juga dibahas dan disempurnakan antara Perangkat Daerah dan Bappedalitbang dan disampaikan kepada Bappedalitbang Provinsi Riau untuk diverifikasi.

Verifikasi tersebut harus dapat menjamin Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan RKPD. Hasil verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

13. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dan acuan akhir dalam penyusunan program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2025-2026;
2. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2025;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan Sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam pembangunan daerah;
4. Menyelaraskan Rancangan Awal Rencana Kerja Provinsi Riau dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
5. Untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam jangka 1 (satu) tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan;

4. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
5. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah; dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk

Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Khusus Provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, dan SDGs (*Sustainable*

Development Goals);

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

4. dan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

5 untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/Sub Kegiatan,
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/Sub Kegiatan,
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator, target dan anggaran masing masing sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2023 (N-2) dan perkiraan target tahun 2024 (N-1).

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2023 serta evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data/informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau kinerja tahun 2023 dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2023 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 30.970.869.034 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.578.884.645 atau setara dengan **98.73%**. Adapun keuangan tersebut mengakomodir 2 (dua) urusan, 3 (tiga) program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun pertama Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 mengacu pada Tabel T-C.29 Permendagri No 86 Tahun 2017 yang disajikan Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU TRIWULAN IV
PERIODE PELAKSANAAN : 2023

NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URISAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II TAHUN 2023								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	KET			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100		15=13+7		16=15/6x100		17	18		
2	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				30,505,744,862		26,827,666,503		30,505,744,862	4,545,001,950	292	9,466,291,763		7,311,167,400	-	9,256,423,532		30,578,884,645					0	0.00					
	2.23.01		Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100	Persen	28,174,523,519	180	Persen	26,261,809,316		28,174,523,519	4,526,450,445	256	8,618,190,111		7,046,580,472		8,154,040,886		28,345,261,914				0	0.00				
	2.23.01.1.02		Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	116	Orang	19,456,052,677	116	Orang	19,872,153,534	100	Perma	19,456,052,677	18	3,478,086,069	33	6,451,233,272	23	4,462,167,375	28	5,382,213,050	102	19,773,699,766			0	0.00			
	2.23.01.1.02		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	116	Orang	19,456,052,677	116	Orang	19,872,153,534	100	Persen	19,456,052,677	18	3,478,086,069	33	6,451,233,272	23	4,462,167,375	28	5,382,213,050	102	19,773,699,766	100	101.63	218	39,645,853,300	188	203.77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
	2.23.01.1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	4	Paket	1,735,885,181	4	Paket	1,048,409,218	100	Perma	1,735,885,181	25	239,200,111	88	331,409,661	166	771,356,831	104	367,958,431	475	1,709,925,034			0	0.00			
	2.23.01.1.06		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	68,832,000	1	Paket	115,070,999	100	Persen	68,832,000	59	40,675,000	0	-	20	28,070,000	-	-	79	68,745,000	100	99.87	80	183,815,999	8009	267.05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
			Sub Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1	Paket	221,250,000	1	Paket	218,820,000	100	Persen	221,250,000	27	59,674,000	12	26,677,000	23	50,828,800	38	83,287,600	100	220,467,400	100	99.65	101	439,287,400	10065	198.55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	756,723,309	1	Paket	161,600,400	100	Persen	756,723,309	10	78,362,929	14	109,146,845	65	495,549,885	6	48,946,705	97	732,006,364	100	96.73	98	893,606,764	9773	118.09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	1	Paket	238,469,872	1	Paket	192,382,380	100	Persen	238,469,872	20	51,613,182	40	102,911,856	29	73,759,111	12	30,143,223	100	258,427,372	100	99.98	101	450,809,752	10098	174.41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	430,610,000	1	Laporan	360,535,439	100	Persen	430,610,000	2	8,875,000	22	92,673,960	29	123,149,035	48	205,589,003	100	430,278,898	100	99.92	101	790,814,337	10092	183.65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
	2.23.01.1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	10	Unit	329,690,113	10	Unit	265,027,195	100	Persen	329,690,113	0	-	7	74,478,000	157	243,903,700	0	-	189	318,381,700			0	0.00			
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	Paket	99,790,050	1	Paket	-	100	Persen	99,790,050	0	-	0	-	90	89,380,000	-	-	90	89,380,000	90	89.57	91	89,380,000	9057	89.57	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	10	Unit	229,900,063	10	Unit	265,027,195	100	Persen	229,900,063	0	-	32	74,478,000	67	154,523,700	-	-	100	229,001,700	100	99.61	110	494,028,895	1096	214.89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
	2.23.01.1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	3	Laporan	4,205,272,498	3	Laporan	3,691,694,263	100	Perma	4,205,272,498	39	784,798,090	47	985,742,919	57	1,170,814,366	74	1,536,502,125	217	4,477,857,500			0	0.00			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1	Laporan	1,707,991,464	1	Laporan	1,237,370,876	100	Persen	1,707,991,464	24	414,847,798	23	398,651,807	31	527,604,694	40	683,790,117	119	2,024,894,416	100	118.55	120	3,262,265,292	11955	191.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	2,497,281,034	1	Laporan	2,444,823,387	100	Persen	2,497,281,034	15	369,950,292	24	587,091,112	26	643,209,672	34	852,712,008	98	2,452,963,084	100	98.23	99	4,897,786,471	9923	196.12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	1	Laporan	-	1	Laporan	9,500,000	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0.00	1	9,500,000	100	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

2.23.01.1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	47	Unit	2,447,623,050	47	Unit	1,384,525,106	100	Persen	2,447,623,050	8	24,366,175	101	775,326,259	97	398,338,200	161	867,367,280	366	2,065,397,914					0	0.00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1	Unit	41,730,000	1	Unit	40,526,216	100	Persen	41,730,000	0	-	21	8,907,852	39	16,350,000	38	15,815,000	98	41,072,852	100	98.43	99	81,599,068	9943	195.54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7	Unit	185,300,000	7	Unit	154,928,390	100	Persen	185,300,000	5	8,503,675	17	31,763,557	23	43,334,350	50	93,555,430	96	177,157,012	96	95.61	103	332,085,402	1466	179.22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	38	Unit	524,860,000	38	Unit	424,143,000	100	Persen	524,860,000	3	15,862,500	27	142,833,850	21	110,233,850	40	210,135,200	91	479,085,400	91	91.28	129	903,228,400	340	172.09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1	Unit	1,695,733,050	1	Unit	764,927,500	100	Persen	1,695,733,050	0	-	35	591,821,000	13	228,400,000	32	547,861,650	81	1,368,082,650	81	80.68	82	2,133,010,150	8168	125.79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																					96.88	97.84	102.06	3,640,471,415.33	5,277.51	132.09				
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase program pembinaan perpustakaan	34	Perpustakaan	1,902,140,596			337,371,174			1,902,140,596		-		693,770,392		122,670,572		1,038,403,232		1,854,844,196								
2.23.02.1.01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan Kab/Kota yang dikelola sesuai SNP	24	Perpustakaan	1,902,140,596	24	Perpustakaan	319,575,024			1,902,140,596	0	0	186	693,770,392	104	122,670,572	207	1,038,403,232		1,854,844,196								
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan	12	Perpustakaan	62,396,726	12	Perpustakaan	47,049,000	12	Perpustakaan	62,396,726	0	0	99	62,064,875		-	0	0	99	62,064,875	100.00	100.00	111	109,113,875	929	174.87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
		Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Perpustakaan yang ditingkatkan kemampuannya	0	-	-	-	-	34,773,242	-	-	-	0	0	0	0		-	0	0	0	0.00	0.00	0	34,773,242	-	0.00			
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	24	Perpustakaan	139,999,839	24	Perpustakaan	-	24	Perpustakaan	139,999,839	0	0	4	21,717,894	7	10,274,000	61	85,942,532	72	117,934,426	100.00	84.24	96	117,934,426	402	84.24		
		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi	50	Orang	99,999,372	50	Orang	-	50	Orang	99,999,372	0	0	6	12,139,353	0	-	31	31,328,200	37	43,467,553	100.00	100.00	87	43,467,553	175	43.47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
		Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi yang mendukung dalam optimalisasi perpustakaan	0	0	0		-	79,568,250	-	-	-	0	0	0	0		-	0	0	0	100.00	0.00	0	79,568,250	-	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan koleksi perpustakaan	4000	Eksemplar	775,821,686	4000	Eksemplar	158,184,532	4000	Eksemplar	775,821,686	0	0	63	12,218,962	175	33,937,672	42	326,819,700	280	372,976,334	100.00	100.00	4,280	531,160,866	107	68.46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
		Sub Kegiatan pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	20	Layanan	823,922,973	20	Layanan	-	20	Layanan	823,922,973	0	0	14	585,629,308	2	78,438,900	72	594,312,800	88	1,258,401,008	100.00	100.00	108	1,238,401,008	541	152.73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi			-	3	Kab/Kota	17,796,150	-	-	-	0	0	0	0		0	0	0	0									
		Sub Kegiatan Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah kabupaten/kota pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	-		-	3	Perpustakaan	17,796,150	-	-	-	0	0	0	0		-	0	0	0	100.00	0.00	3	17,796,150	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																					87.50	60.53	985.83	274,026,921.25	269.23	65.47				
Predikat Kinerja																					Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	98.95				

2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				429,080,747			228,486,013			429,080,747	4	18,551,505	36	154,331,260	33	141,916,356	15	63,979,414	88	378,778,535																												
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip	33	OPD	429,080,747	33	OPD	228,486,013			429,080,747	4	18,551,505	36	154,331,260	33	141,916,356	15	63,979,414	88	378,778,535																												
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		7920	Berkas	51,944,885	7920	Berkas	-	7920	Berkas	51,944,885	0	-	0	0	48	24,852,800	32	16,750,950	80	41,603,750				41,603,750																								
		Sub Kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	7920	Berkas	51,944,885	7920	Berkas	-	7920	Berkas	51,944,885	0	-	0	0	48	24,852,800	32	16,750,950	80	41,603,750	100.00	80.09	8,000	41,603,750	101	0.00																						
2.23.02.1.02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase OPD dan Kab/Kota yang sudah melaksanakan kearsipan bersfat statis	33	OPD	220,120,337	33	OPD	99,576,453	33	OPD	220,120,337	16	18,551,505	65	143,668,538	18	40,560,000	7	16,050,014	107	218,830,057																												
		Sub Kegiatan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dikuaisisi perangkat daerah/institusi perseorangan	55	Arsip	220,120,337	55	Arsip	99,576,453	33	OPD	220,120,337	16	18,551,505	65	143,668,538	18	40,560,000	7	16,050,014	107	218,830,057	100.00	99.41	162	318,406,510	295	144.65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau																					
2.23.02.1.03		Kegiatan Pengolahan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Berkas arsip yang diuiah media (manual ke digital)	2600	Pengguna	157,015,525	2600	Pengguna	128,909,560	2424	Persen	157,015,525	300	-	17	10,662,722	86	76,503,556	49	31,178,450	451	118,344,728							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau																					
		Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah OPD provinsi yang ditingkatkan data arsip statis ke JIKN	2600	Pengguna	45,687,790	2600	Pengguna	45,330,904	2500	Arsip	45,687,790	0	0	12	5,428,371	28	13,019,000	36	16,478,950	76	34,926,321	90.00	76.45	2,676	80,257,225	108	175.66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau																					
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah OPD provinsi Kab/Kota pengawasan dan pendampingan kearsipan	1	Laporan	111,327,735	1	Laporan	83,578,656	2500	Arsip	111,327,735	1	0	5	5,234,351	57	63,484,556	13	14,699,500	76	83,418,407	90.00	74.93	77	166,997,063	7093	150.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau																					
																				-	0	0				-																								
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																					95.00	82.72	10,915.45	648,868,298.00	2,047.88	113.85																								
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																					93.13	80.36			2531.54	122.97																								
PREDIKAT KINERJA PROGRAM																					Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																																		
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD Berikutnya:																																																		

Dari tabel Rakapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja diatas, capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023 dengan predikat kinerja capaian program keseluruhan Sangat Tinggi atau rata-rata capaian seluruh kinerja program 97,40 %. Uraian realisasi program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, dan melebihi target dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan:

Tidak terdapat capaian program yang tidak memenuhi target pada tahun 2023 dan perkiraan capaian sampai dengan tahun berjalan.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan:

Tabel 2.2
Realisasi Per Program
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	BOBOT %	REALISASI	(%)
1.	Program Penunjang Urusan	28.653.169.691	92.52	28.345.261.914	98.93
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.902.258.596	6.14	1.854.844.196	97.51
3.	Program Pengelolaan Kearsipan	415.440.747	1.34	378.778.535	91.18
JUMLAH BELANJA		30.970.869.034	100	30.578.884.645	98.73

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator presentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan realisasi keuangan 98.73% dan Realisasi fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan dan 23 Sub kegiatan.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan:

Pada Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi dimana meningkatnya penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang ditargetkan 44 Perpustakaan sesuai kewenangan dan yang tercapai sebanyak 55 Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (124,85%), dimana jumlah perpustakaan yang sesuai kewenangan provinsi sebanyak 829 Perpustakaan.

Pada Program Pengelolaan Arsip terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan kearsipan yang ditargetkan sebanyak 2.600 orang dan realisasinya mencapai 4.566 orang (152%).

2.1.4 2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan untuk urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

- Jangkauan wilayah yang luas dan kesiapan sekolah-sekolah untuk mengikuti akreditasi.
- Penguatan tenaga perpustakaan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi baik secara webinar maupun langsung ke daerah.
- Advokasi ke Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan untuk melaksanakan perpustakaan yang sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan (SNP).
- Kolaborasi stakeholder (Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Perpustakaan Nasional RI untuk mendorong integrasi satu data satu agenda.
- Kolaborasi lintas organisasi kepastakawan (IPI, ATPUSI, FTBM, dsb untuk peningkatan kualitas layanan pada berbagai jenis perpustakaan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah dari gambaran Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Riau, telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dimana indikator kegiatan telah dibuat setiap tahunnya sebagai target kinerja OPD dan menjadi penunjang bagi pencapaian Renstra Provinsi. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan akan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan dalam pencapaian indikator target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Untuk capaian Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 dapat dievaluasi dengan mengacu pada Permendagri 050-5889 Tahun 2021.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yakni urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan. Tahun 2023 untuk urusan Perpustakaan terdiri atas 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dan urusan Kearsipan ada 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Bila dibandingkan tahun 2023, Tahun 2024 dari segi ketersediaan anggaran jumlah pagu anggaran lebih kecil bila di bandingkan dengan tahun 2023. Tahun 2023 Total anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebesar Rp. 30.970.869.034 (Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh puluh juta Delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah), Pada tahun 2024 anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 29.989.070.423 (Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus

dua puluh tiga rupiah) Tahun 2024 mengalami penurunan yakni sebesar Rp 981.798.611 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Dari kedua urusan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau merencanakan dan menetapkan Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengelolaan Arsip yang terurai dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau, yaitu:

1. **Urusan Perpustakaan** memiliki 1 (satu) Program yakni Program Pembinaan Perpustakaan yang terdiri atas mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu: kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.1.902.258.596 yang terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Pengembangan dan pemeliharaan Perpustakaan elektronik dengan anggaran sebesar Rp 62. 396.726,-
 - b. Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus diseluruh wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp 139.999.839,-
 - c. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan Pustakawan tingkat daerah provinsi dengan anggaran sebesar Rp 48.249.372,-
 - d. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 1.273.574.973,-
 - e. Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka dengan anggaran sebesar Rp 378.037.686,-
 - f. Realisasi kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi ini mencapai target sebesar 97,51% atau sebesar Rp.1.854.844.196,- dari pagu anggaran sebesar Rp.1.902.258.596.
2. **Urusan Kearsipan** dengan Program Pengelolaan kearsipan, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan :
 - a. **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi** yang bertujuan :
 1. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelola arsip dan arsiparis tentang bagaimana mengelola arsip dinamis (arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga) serta menyamakan persepsi tentang bagaimana mengelola kearsipan di unit pencipta arsip (OPD) yang

telah dipilih di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Memberikan materi tentang kearsipan, yang berisi bagaimana cara pengelolaan arsip dinamis, arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, serta Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, memberikan dasar hukum, tanggungjawab, fungsi dan tugas pokok sebagai pengelolaan kearsipan.
3. Pembinaan secara langsung dengan cara praktek langsung pengelolaan arsip dinamis di tempat, proses dan penggunaan komponen kearsipan serta tata cara pengolahan dan penyimpanan arsip yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai standar kearsipan nasional.
4. Melaksanakan konsultasi dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh pengelola arsip di Unit Pencipta Arsip, serta memberikan solusi secara bersama.

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi** ini adalah untuk mencapai program Pengelolaan Arsip khususnya pengelolaan arsip dinamis di masing-masing OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baik sesuai standar dan prosedur kearsipan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan capaian realisasi kegiatan sebesar 41.603.750 atau tercapai 91,95 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 45.244.885.

- b. **Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi** dengan anggaran sebesar Rp. 220.120.337 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan realisasi anggaran Rp. 218.830.057 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) memiliki tujuan :

1. Pembinaan ke OPD Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman,
2. Agar OPD bisa dengan mudah menemukan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat, terhindari dari pemborosan tenaga dan waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang dibutuhkan

- c. **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi** dengan anggaran sebesar Rp. 220.120.337 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan realisasi anggaran Rp. 218.830.057 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) Tujuan Kegiatan **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi**

1. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan khususnya Arsip

Dinamis (arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga) serta menyamakan persepsi tentang bagaimana mengelola kearsipan di unit Kerja

2. Memberikan materi tentang bagaimana cara mengelola arsip Dinamis arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, serta memberikan dasar hukum, tanggungjawab, fungsi dan tugas pokok sebagai pengelolaan kearsipan.
3. Pembinaan secara langsung dengan cara praktek langsung pengelolaan arsip dinamis di tempat, proses dan penggunaan komponen kearsipan serta tata cara pengolahan dan penyimpanan arsip yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai standar kearsipan nasional.

d. **Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Provinsi** dengan anggaran sebesar Rp 150.075.525 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima ratus dua puluh lima rupiah) serapan anggaran Rp 118.344.728 (Seratus Delapan Belas juta Tiga ratus Empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Provinsi dimaksudkan untuk menyediakan informasi bagi masyarakat terkait arsip dan menciptakan arsiparis dan/atau pengelola arsip yang ada di unit-unit kearsipan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditunjuk untuk mendapat bimbingan tentang pengelolaan arsip dinamis (arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga) secara baik dan benar berdasarkan kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku dan menyediakan sarana informasi terkait kearsipan melalui aplikasi srikandi dan SIKN.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab tersebut.

Dari uraian diatas maka kebijakan atau tindakan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan melalui pimpinan dengan dukungan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Indikator kinerja setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 juga memuat evaluasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2023. Dalam evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan.
2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan
3. Hasil Rencana Program & Kegiatan Pada evaluasi penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel T-C.30. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	44		4.70	5.31	8.20		5.31	6.63	8.20		
2	Persentase masyarakat yang menggunakan akses layanan kearsipan	3.000		2.600	3.000	3.452	3.452	4.758	3.000	3.452	3.452	

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mempunyai 2 (dua) urusan yaitu Urusan Bidang Perpustakaan dan Urusan Bidang Kearsipan yang dituangkan dalam sasaran dinas yang berasal dari tujuan Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat** dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dengan indikator persentase perpustakaan tingkat provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Meningkatnya Penerapan Standar Nasional Perpustakaan dengan indikator kinerja :

a. Nilai Indeks Literasi Masyarakat.

Penilaian Indek Literasi Masyarakat terdiri dari 7 unsur yaitu :

- a. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)
- b. Ketercukupan Koleksi (UPLM2)
- c. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)
- d. Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (UPLM4)
- e. Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM5)
- f. Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan perpustakaan (UPLM6)
- g. Jumlah Anggota Perpustakaan



Pencapaian nilai IPLM Provinsi Riau sebesar 70,98 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Lima Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Pekanbaru 98,67, Kab. Kampar 79,71, Kab. Kepulauan Meranti 77,25, Kab. Pelalawan 76,51, dan Kab. Kuantan Singingi 75,23. Sedangkan, lima Kab/kota yang terendah yaitu Kab. Rokan Hilir 65,05, Kab. Bengkalis 63,04, Kab. Indragiri Hulu 62,67, Kota Dumai 61,87, dan Kab. Siak 59,69.

Tabel 2.4
Rekapitulasi IPLM per Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

NO	PROVINSI/ KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPML3	UPML4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
1	PROVINSI RIAU	3.518	0.2753	1,0000	0.0543	1,0000	1,0000	1,0000	66.88
2	Kab. Bengkalis	0,2976	0,1213	0,3045	0,0467	1,0000	1,0000	1,0000	53,86
3	Kab. Indragiri Hilir	0,1832	0,0766	0,8929	0,0370	0,2396	1,0000	1,0000	48,99
4	Kab. Indragiri Hulu	0,2912	0,2510	1,0000	0,0524	0,6669	1,0000	1,0000	60,88
5	Kab. Kampar	0,3344	0,2978	1,0000	0,0199	0,3168	1,0000	1,0000	56,70
6	Kab. Kepulauan Meranti	0,2323	0,3011	1,0000	0,0632	0,8271	1,0000	1,0000	63,19
7	Kab. Kuantan Singingi	0,4915	0,2810	1,0000	0,0328	0,7294	1,0000	1,0000	64,78
8	Kab. Pelalawan	0,3252	0,5023	1,0000	0,0915	0,7684	1,0000	1,0000	66,96
9	Kab. Rokan Hilir	0,1416	0,2422	0,1063	0,0349	1,0000	1,0000	1,0000	50,36
10	Kab. Rokan Hulu	0,2608	0,2457	0,1416	0.0402	1,0000	1,0000	1,0000	52,69
11	Kab. Siak	0,6055	0,2804	1,0000	0,0871	0,9314	1,0000	1,0000	70,06
12	Kota Dumai	0,5065	0,2299	1,0000	0,0533	1,0000	1,0000	1,0000	68,42
13	Kota Pekanbaru	0,7958	0,4211	1,0000	0,0856	0,6515	1,0000	1,0000	70,77

Sumber : Perpustakaan Nasional RI tahun 2023

- b. Persentase Perpustakaan yang sesuai SNP dengan formulasi perhitungan Jumlah Perpustakaan memperoleh SNP dibagi jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi dikali 100%.
- Jumlah Perpustakaan yang sudah memenuhi SNP sampai dengan tahun 2022 sebanyak 44 Perpustakaan yang terakreditasi dengan target 39 Perpustakaan dan pada tahun 2023 target Perpustakaan sesuai SNP sebanyak 44 Perpustakaan dan realisasinya sebanyak 55 perpustakaan, jadi jumlah perpustakaan sampai dengan tahun 2023 adalah 55 perpustakaan ditambah 11 perpustakaan sehingga menjadi 55 Perpustakaan dengan jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan sebanyak 829 perpustakaan, dengan target 5.31 % dan realisasi sebesar 6.63% dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut $(55/829 \times 100\%) = 6.63\%$. Target untuk tahun 2023 adalah sebesar 5.31%, dimana capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah realisasi dibagi target dikali 100% $(6.63/5.31 \times 100\%) = 124,86\%$.
- c. Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat, dengan Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi.

HASIL TGM PROVINSI RIAU
HASIL TGM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SAMPEL KAJIAN

Wilayah Kajian	Provinsi	Kabupaten/Kota		
	Riau	Kota Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Kab. Kep. Meranti
Nilai TGM	66,69	69,41	66,26	64,83
Frekuensi Membaca				
1. Nilai Skor	71,31	73,50	72,75	66,25
2. Frekuensi Membaca/Minggu	5 kali/minggu	5 - 6 kali/minggu	5 - 6 kali/minggu	5 kali/minggu
Durasi Membaca				
1. Nilai Skor	54,13	56,50	51,63	56,75
2. Durasi Membaca (Jam/Hari)	1 jam 40 menit	1 jam 46 menit	1 jam 34 menit	1 jam 46 menit
3. Durasi Membaca (Jam/Minggu)	9 jam 25 menit	9 jam 53 menit	9 jam 11 menit	9 jam 27 menit
Banyaknya Buku di Baca/3 bulan				
1. Nilai Skor	73,94	76,75	73,00	73,00
2. Banyaknya buku/3 bulan	5 - 6 buku/triwulan	5 - 6 buku/triwulan	5 - 6 buku/triwulan	5 - 6 buku/triwulan
Frekuensi Akses Internet				
1. Nilai Skor	77,06	81,75	78,25	70,00
2. Frekuensi Akses Internet/Minggu	5 - 6 kali/minggu	6 kali/minggu	6 kali/minggu	5 kali/minggu
Durasi Akses Internet				
1. Nilai Skor	60,50	66,00	62,75	50,50
2. Durasi Akses Internet (Jam/Hari)	1 jam 55 menit	2 jam 8 menit	2 jam 1 menit	1 jam 32 menit
3. Durasi Akses Internet (Jam/Minggu)	11 jam 58 menit	13 jam 53 menit	12 jam 42 menit	8 jam 34 menit

1. Meningkatkan Akses Layanan Kearsipan dengan indikator Persentase masyarakat yang menggunakan akses layanan kearsipan.

Persentase masyarakat yang menggunakan Akses Layanan Kearsipan dengan Formulasi Jumlah Kunjungan Masyarakat Menggunakan Layanan Kearsipan berdasarkan Data BPS Jumlah penduduk usia 15 – 69 Tahun (4.496.006) di kali 100%. Target untuk tahun 2022 adalah 0.058% untuk (2.600 orang /4.496.006 orang x 100%) dan realisasi sebanyak 4.758 Orang pengguna layanan, dengan perhitungan target kinerja (4.758 orang /4.496.006 orang x 100%) = 189.66%. Capaian Kinerja sebesar 183% dengan perhitungan realisasi dibagi target dikali 100% (4.758 orang/2.600 orang x 100%) = 183%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan strategi dan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain sebagai berikut :

- a. Persentase Perpustakaan Tingkat Provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dengan Indikator Kinerja Jumlah Perpustakaan yang memperoleh akreditasi.
- b. Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan dengan Indikator Persentase Masyarakat yang menggunakan Akses Layanan Kearsipan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.2.1 Permasalahan

Adapun masalah pokok penyelenggaraan tugas kepastakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas perpustakaan
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dengan akar masalah Kurangnya pembaharuan koleksi perpustakaan dan Kurangnya Pemeliharaan terhadap kelengkapan peralatan pendukung maupun penunjang perpustakaan
 - Masih rendahnya kompetensi SDM pengelola perpustakaan, dengan akar masalah Kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM secara berkala/periodik (capacity building)
 - Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat dengan akar masalah kurangnya instensitas Kerjasama kunjungan ke perpustakaan kepada Lembaga atau instansi serta kurangnya sosialisasi dan promosi layanan perpustakaan melalui pameran dan layanan perpustakaan keliling.
 - Masih rendahnya layanan digitalisasi perpustakaan dan dan pemanfaatan informasi teknologi dengan akar masalah kurangnya inovasi layanan dan penggunaan informasi teknologi yang belum optimal.
- b. Masih rendahnya akses layanan arsip

- Belum terpenuhinya standar kompetensi SDM layanan kearsipan dengan akar masalah kurangnya Pendidikan dan pelatihan SDM secara berkala/periodik (*capacity building*).
- Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan layanan informasi kearsipan dengan akar masalah kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap penguatan kelembagaan kearsipan daerah.
- Masih rendahnya pemanfaatan informasi teknologi terhadap layanan kearsipan dengan akar masalah rendahnya pengetahuan SDM terhadap pemanfaatan teknologi sebagai media menuju arsip digital. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai dengan akar masalah terbatasnya kapasitas depot arsip yang sesuai standar.

2.3.2.2. Hambatan

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Hambatan penyelenggaraan perpustakaan
 - Kurangnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan
 - Kurangnya tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kemampuannya
 - Kurangnya jumlah bahan Pustaka
 - Kurangnya layanan teknologi informasi perpustakaan
- b. Hambatan penyelenggaraan kearsipan
 - Kurangnya pengelolaan arsip dinamis
 - Kurangnya pengelolaan arsip statis
 - Kurangnya penggunaan pelayanan arsip SIKN

2.3.3.2 Dampak Terhadap Capaian Program Nasional

Adapun dampak penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan di Provinsi Riau terhadap pencapaian program Nasional sebagai berikut :

Urusan Perpustakaan :

1. Peningkatan kegemaran membaca Masyarakat
 - a. Nilai Tingkat kegemaran membaca Masyarakat
2. Pembangunan Literasi Masyarakat Meningkat
 - a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Urusan Kearsipan :

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
 - a. Indeks hasil pengawasan

INDIKATOR	TARGET	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025
Nilai Tingkat kegemaran membaca Masyarakat	71,5	Nilai	66,69	67,00	68,00
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,5	Index	66,88	70,98	71,00
Indeks hasil pengawasan kearsipan di lingkup pemerintahan daerah	60	Nilai	90,04	81,59	90,05

2.3.2.3 Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pendidikan berkualitas menjadi tujuan keempat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat sepuluh target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pada bab ini, terdapat 10 indikator yang disajikan untuk menghitung capaian tujuan kelima. Secara umum, di tahun 2021 Riau mengalami perkembangan capaian pada tujuan keempat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah baik pada jenjang pendidikan formal dan non formal dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi. Pegetahuan keterampilan teknologi informasi yang diperoleh juga semakin meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, dari sisi kualitas penyelenggaraan pendidikan, terjadi peningkatan penyediaan sarana prasarana di sekolah yang mendukung proses belajar, diantaranya akses listrik, komputer, internet, air minum, sanitasi, dan sarana cuci tangan. Hal ini juga meningkatkan kebersihan dan tingkat kesehatan peserta didik. Ditambah pula semakin meningkatnya kualitas tenaga pendidik.

INDIKATOR 4.1.1.(A) PROPORSI ANAK-ANAK DAN REMAJA DI: (I) KELAS 5 (B) KELAS 8, DAN (C) USIA 15 TAHUN YANG MENCAPAI SETIDAKNYA TINGKAT KEMAHIRAN MINIMUM DALAM: (I) MEMBACA, (II) MATEMATIKA

Indikator ini mengukur capaian belajar siswa dalam kompetensi dasar akademik yang meliputi membaca (literasi) dan matematika (numerasi). Capaian ini menggambarkan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP) di Indonesia. Capaian indikator

ini dapat diukur melalui dua sumber data: a. Pertama, capaian kompetensi minimum untuk siswa kelas 5 dan kelas 8 diukur dengan menggunakan hasil AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. AKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Perpustakaan dan kearsipan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. b. Kedua, hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment)

digunakan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa usia 15 tahun di kelas 9 ataupun kelas 10. PISA adalah survei internasional yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara melalui uji kemampuan di bidang literasi, numerasi, dan sains. Berdasarkan hasil analisa data di atas, kemampuan siswa kemudian dibagi kedalam dua kelompok: 1) siswa di bawah standar minimum; dan 2) siswa yang mencapai atau melampaui standar minimum.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dihadapkan kepada peluang dan tantangan dengan keberadaan Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Urusan Perpustakaan :

Pada urusan Perpustakaan Dalam upaya meningkatkan mutu layanan perpustakaan Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan layanan perpustakaan guna menumbuh kembangkan budaya Gemar Membaca kepada seluruh lapisan masyarakat serta sejalan dengan Program Nasional (PN) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Keberhasilan suatu lembaga perpustakaan bukan hanya dilihat dari sumber daya manusianya saja, akan tetapi ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana yang tentunya merupakan penentu dari peningkatan jumlah pemustaka yang berkunjung, yang didukung adanya Program dari Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Adanya Arahan Prioritas Nasional Tentang Strategi Pengembangan Perpustakaan Ditingkat Provinsi, Kab/Kota Sampai dengan Tingkat Desa, Adanya Dana Dekonsentrasi Perpustakaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK); Untuk mewujudkan tercapainya kinerja layanan perpustakaan maka harus terpenuhi :

- meningkatnya pengunjung perpustakaan dengan terpenuhinya jumlah kunjungan, peningkatan diversifikasi layanan perpustakaan, jumlah jenis layanan perpustakaan, meningkatnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pada setiap layanan;
- Meningkatnya budaya gemar membaca dengan terpenuhinya Persentase pemenuhan implementasi pembudayaan gemar membaca, meningkatnya promosi perpustakaan,

jumlah promosi gemar membaca, meningkatnya pengembangan bahan perpustakaan dan jumlah koleksi perpustakaan;

- Meningkatnya Pelestarian Bahan Perpustakaan dan naskah kuno dengan tercapainya meningkatnya alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno, meningkatnya preservasi atau perawatan fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- Meningkatnya pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dengan terpenuhinya meningkatnya penelusuran koleksi budaya etnis, meningkatnya koleksi budaya etnis secara digital;
- Meningkatnya serah simpan KCKR koleksi daerah dengan terpenuhinya meningkatnya kerjasama dengan penerbit, lembaga dan perseorangan, meningkatnya pengelolaan koleksi deposit;
- Meningkatnya penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan terpenuhinya meningkatnya data katalog induk daerah, meningkatnya data Bibliografi Daerah;
- Peningkatan Kelembagaan Perpustakaan dengan terpenuhinya jumlah perpustakaan yang diakreditasi, meningkatnya pembinaan kelembagaan perpustakaan, jumlah perpustakaan yang dibina, meningkatnya mutu kelembagaan perpustakaan dan jumlah perpustakaan yang mengikuti lomba pengelolaan perpustakaan;
- Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan dengan terpenuhinya jumlah pengelola pustaka yang meningkatkan kompetensi, meningkatnya kompetensi SDM Perpustakaan, jumlah SDM Perpustakaan, meningkatnya jenis kompetensi SDM Perpustakaan dan jumlah jenis peningkatan kompetensi perpustakaan.

Urusan Kearsipan :

Sedangkan urusan Kearsipan untuk menjamin tercipta dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan sebagai implementasi dari pelayanan yakni pencapaian Indeks Manajemen Kearsipan dengan kategori penilaian yang telah ditetapkan oleh ANRI. Adanya Program SIKN/JIKN untuk Pelayanan Informasi Kearsipan Kepada Masyarakat (*stake holder*), Masyarakat semakin mengerti akan pentingnya arti arsip sebagai sumber informasi dalam pembangunan daerah dan pertanggungjawaban kepemilikan arsip, Adanya Regulasi dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia Tentang Tata Kelola Kearsipan; Untuk mewujudkan tercapainya kinerja urusan kearsipan maka harus terpenuhi :

- Peningkatan layanan informasi, pendayagunaan dan perlindungan akses arsip dengan terpenuhinya jumlah arsip yang dilayankan dan dapat diakses, meningkatnya layanan

arsip, jumlah layanan arsip yang dilayani, meningkatnya layanan digital informasi arsip dan jumlah arsip yang dilayankan dan dapat diakses.

- Peningkatan pembinaan kearsipan internal dengan terpenuhinya persentase OPD yang dibina, meningkatnya pengelolaan arsip dinamis, jumlah OPD yang telah mengelola arsip sesuai NSPK, meningkatnya prasana dan sarana pengelolaan arsip di OPD dan jumlah OPD yang telah memenuhi standart prasana dan sarana kearsipan;
- Peningkatan pembinaan kearsipan eksternal dengan terpenuhinya persentase lembaga kearsipan eksternal yang dibina, meningkatnya pembinaan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), jumlah LKD yang meningkat Indeks Manajemen Kearsipan, meningkatnya pembinaan lembaga pencipta arsip dan jumlah lembaga pencipta arsip lainnya yang dibina;
- Peningkatan akuisisi arsip dengan terpenuhinya jumlah pencipta arsip yang diakuisisi dan yang menyerahkan arsip keLembaga Kearsipan Daerah (LKD), meningkatnya akuisisi arsip statis, jumlah pencipta arsip yang diakuisi arsip statisnya, meningkatnya pengelolaan arsip inaktif perangkat daerah dan jumlah pencipta arsip yang menyerahkan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- Peningkatan perawatan arsip LKD dengan terpenuhinya jumlah arsip yang dilakukan pengolahan, perawatan dan pemeliharaan, meningkatnya pengolahan arsip, jumlah arsip statis dan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang diolah, meningkatnya perawatan arsip statis LKD, jumlah arsip statis LKD yang dilakukan perawatan, meningkatnya pemeliharaan prasarana dan sarana arsip LKD dan jumlah prasana dan sarana arsip LKD yang terpelihara.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting

Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

Dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau merumuskan ke dalam 2 (dua) urusan sebagai berikut :

Isu-isu Strategis Urusan Perpustakaan :

Pada urusan Perpustakaan isu-isu strategis yang muncul adalah adanya perkembangan kemajuan Teknologi dan Industri generasi 4.0 terjadinya pergeseran paradigma masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan berupa transformasi perpustakaan dari manual menjadi digital. Dan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dan ruang terbuka, serta menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatannya.

Adapun yang menjadi isu-isu yang akan dihadapi dimasa yang akan datang terhadap urusan perpustakaan antara lain :

1. Peningkatan tingkat literasi masyarakat.

2. Peningkatan perpustakaan tingkat provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang disebabkan :
3. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
4. Pemenuhan ketercukupan tenaga perpustakaan
5. Peningkatan koleksi perpustakaan Peningkatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan.

Isu-isu Strategis Urusan Kearsipan

Sedangkan urusan Kearsipan isu-isu strategis yang akan dihadapi adalah kemudahan dalam proses administrasi menggunakan kemajuan teknologi e-goverment berupa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan memudahkan dalam pengelolaan tata kelola kearsipan secara baik dan baku serta tersusun dengan rapi, sehingga mudah untuk dipergunakan kembali apabila diperlukan. Serta perlu menanamkan kepada setiap individu bahwa arsip itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.

Adapun yang akan menjadi isu-isu urusan Kearsipan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pengawasan kearsipan;
2. Peningkatan kualitas tata laksana kearsipan
3. Peningkatan pengelolaan arsip dinamis
4. Peningkatan pengelolaan arsip statis
5. Mengoptimalkan penggunaan SIKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan maksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target yang ada dan telah disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu review ini didasarkan tingkat kinerja yang dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/prioritas dan pagu indikatif untuk Dinas Perpustakaan dan kearsipan.

Proses yang dilakukan dalam review ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Identifikasi prioritas program dan kegiatan yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.
2. Menentukan indikator kinerja program/kegiatan dengan cara membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dengan hasil analisis yang dilakukan pada tahap- tahap sebelumnya.
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama.

4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan prioritas telah termuat dalam rancangan awal RKPD atau belum.
5. Identifikasi program/kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Menentukan program dan kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan dan pagu indikatif/besaran dana yang dibutuhkan dan dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD secara lengkap mengacu pada Tabel T-C.31 Permendagri 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.5 dibawah ini

Tabel.2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.522.172.045					38.497.647.104	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				34.766.269.244					37.577.905.446	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Pekanbaru	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	33.460.250.767	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Pekanbaru	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	35.410.557.513	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	20.766.531.145	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	25.442.782.896	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	116 orang	20.766.531.145	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	116 orang	25.442.782.896	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumla Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Layanan	1.281.181.494	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumla Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Paket	1.455.209.539	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	68.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	68.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	332.483.539	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	332.483.539	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	230.834.955	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	255.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	1 Paket	200.000.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Laporan	449.863.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Laporan	599.726.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Jenis Barang	350.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	625.166.950	
	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	100.029.950	Kursi putar bulat untuk pemustaka
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	525.137.000	Komputer, Infokus, Scanner, Printer, CCTV, Drone, Print Head Print Barcode
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	4.351.448.128	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.401.448.128	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	5 Laporan	1.741.448.128	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	1 Laporan	1.741.448.128	Terjadinya kenaikan tagihan listrik karena layanan ekstra sabtu dan minggu
	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	2.600.000.000	Penyediaan Jasa	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan	1 Laporan	2.650.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
	Umum Kantor	Pekanbaru	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	6.636.090.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	3.410.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 unit	47.790.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 unit	47.790.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	188.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	188.300.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	524.860.000	Perbaikan robotik scanner, service AC dan service komputer
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 unit	6.250.000.000	Pemeliharaan/Rea habilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 unit	2.650.000.000	Rehab gedung arsip dan gedung sekretariat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.306.018.477					2.167.347.933	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Pekanbaru	Indeks Kepuasan Masyarakat	30 pustaka	1.216.018.477	ROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Pekanbaru	Indeks Kepuasan Masyarakat	24 Perpustakaan	2.077.347.933	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum,	30 Perpustakaan	1.126.018.477	Pengelolaan Perpustakaan	Kota Pekanbaru	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum,	33 Perpustakaan	1.977.347.933	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
			Perpustakaan SMA/SMK/MA, Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai standar Nasional Perpustakaan			Tingkat Daerah Provinsi		Perpustakaan SMA/SMK/MA, Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai standar Nasional Perpustakaan			
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	100.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	12 Perpustakaan	137.603.274	Pendampingan mencapai ISO 20000
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	140.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	140.000.000	Pembinaan SDM atau tenaga pustaka se Provinsi Riau
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	44.040.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000	Bimtek SDM (pustakawan)
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan	10 Layanan	385.738.477	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan	20 Layanan	823.922.973	Layanan ekstra, layanan pusling, seragam layanan
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau dan Perpustakaan Kab/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 eksemplar	456.240.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau dan Perpustakaan Kab/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 eksemplar	775.821.686	Kamera digital alih media naskah kuno
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	90.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Kota Pekanbaru	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat	100 Persen	100.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
						Provinsi		Daerah Provinsi			
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	2 orang	50.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	2 orang	50.000.000	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 orang	40.000.000	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 orang	50.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Persentase Peningkatan Koleksi Daerah dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi	100 Persen	90.000.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Persentase Peningkatan Koleksi Daerah dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi	100 Persen	90.000.000	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2 Paket	40.000.000	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2 Paket	40.000.000	
	Penerbitan Katalog Induk Penerbitan Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	650 Entry	20.000.000	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	650 Entry	20.000.000	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	250 Naskah	20.000.000	Penerbitan Bibliografi Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	250 Naskah	20.000.000	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi yang dilestarikan	2 Naskah	50.000.000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi yang dilestarikan	2 Naskah	20.000.000	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih Mediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didaya gunakan	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	60 Eksemplar	50.000.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih Mediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didaya gunakan	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	25 Eksemplar	20.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				755.902.801						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik	100 Persen	755.902.801	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik	100 Persen	919.741.658	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Persentase Arsip Dinamis Provinsi Yang Dikelola	100 Persen	70.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Persentase Arsip Dinamis Provinsi Yang Dikelola	100 Persen	70.000.000	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2500 Arsip	70.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	3000 Arsip	70.000.000	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Perangkat Daerah/ Institusi/ Perseorangan	Persentase Arsip Statis Daerah Provinsi Yang Dikelola	100 Persen	285.097.568	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Perangkat Daerah/ Institusi/ Perseorangan	Persentase Arsip Statis Daerah Provinsi Yang Dikelola	100 Persen	285.097.568	
	Akusisi Arsip Statis	Depo Arsip Provinsi Riau	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	600 Arsip	285.097.568	Akusisi Arsip Statis	Depo Arsip Provinsi Riau	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	600 Arsip	285.097.568	
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip SIKN Tingkat Provinsi	8,30 Persen	400.805.233	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip SIKN Tingkat Provinsi	15,99 Persen	564.644.090	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Lembaga Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3250 Pengguna	112.333.677	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Lembaga Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3500 Pengguna	112.333.677	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	288.471.556	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	452.310.413	Peningkatan SDM arsiparis

2.4.3 Temuan Temuan Setelah Proses Review Ranwal RKPD

Temuan dari hasil review ranwal RKPD ditemui perbedaan sebagai berikut

Adapun penambahan pagu pada program, kegiatan dan sub kegiatan dari Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan terdapat pada :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada :

- 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Dari uraian kegiatan dan sub kegiatan diatas adalah untuk menunjang operasional urusan perpustakaan dan urusan kearsipan untuk peningkatan kualitas Perpustakaan dan kualitas Kearsipan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Renstra tahun 2019-2024.

b. Program Pembinaan Perpustakaan pada :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi pada
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar

Nasional Perpustakaan

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
- d. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- c. Program Pengelolaan Arsip pada :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan adalah:

- a. Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada kegiatan Pengadaan Pengolahan Preservasi Koleksi Perpustakaan dengan Rancangan Awal RKPD target 7.000 eksemplar hal ini sesuai dengan kondisi koleksi yang ada saat ini yang kemungkinan rusak dan lain sebagainya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dengan dukungan anggaran dan Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 10.000 eksemplar hal ini akan dicapai pada akhir pencapaian Renstra 2024.
- b. Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada kegiatan Penelusuran digital Bahan Perpustakaan (*Centre of Excellent*) Koleksi Budaya Lokal se-Sumatera dengan Rancangan Awal RKPD target 2 Provinsi sedangkan Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 Provinsi hal ini akan dicapai pada akhir pencapaian Renstra 2024.
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada kegiatan Pendampingan pengelolaan arsip Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD target 5 OPD sedangkan Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 10 OPD hal ini akan dicapai pada akhir pencapaian Renstra 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Proses usulan program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh dari kegiatan forum perangkat daerah yang merupakan tahapan dari proses perencanaan untuk menampung aspirasi baik yang berasal dari pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau, OPD mitra di Pemprov Riau, Perguruan Tinggi , organisasi

kemasyarakatan mitra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Pokok-pokok pikiran yang berasal dari anggota DPRD Provinsi Riau sesuai dengan kewenangan yang di atur oleh peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan program prioritas nasional dimana melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dikembangkan program Transformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatnya pendapatan untuk kesejahteraan keluarga. Untuk Provinsi Riau pada tahun 2018 memperoleh ada 3 (tiga) Kabupaten sasaran program Transformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial yakni Kabupaten Siak, Kabupaten pelalawan, dan Kabupaten Kampar. Untuk tahun 2019 terdapat 2 (dua) Kabupaten Siak dan Kabuapten Kampar. Pada 2020 ada 3 (tiga) Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan san Kabupate Siak, tahun 2021 ada 3 (tiga) Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu, tahun 2022 hanya 1 (satu) Kabupaten Bengkalis, tahun 2023ada 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Terkait usulan program dan kegiatan mendukung tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau terkait dengan usulan pemangku kepentingan mengacu pada tabel T-C.32 Permendagri 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.6 dibawah ini:

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

- 2.5.1 Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan masyarakat tersebut diperoleh;
Untuk mendapatkan usulan program/kegiatan yang ada pada tabel di atas melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang dilaksanakan pada OPD masing-masing yang terkait, dengan mengundang OPD Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota dan OPD mitra yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Anggota DPRD Provinsi Riau, Ormas Mitra, forum literasi dan lain-lain.
- 2.5.2 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada dasarnya usulan tersebut sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, sehingga dapat diterima sebagai usulan program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

2.6 Kelompok Sasaran Layanan

a. Kelompok Sasaran Urusan Perpustakaan

- Masyarakat Pemustaka;
- Instansi Pemerintah, BUMN/D, Swasta,
- Perpustakaan SMA, SMK dan SLB
- Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial Politik Tingkat Provinsi;
- Tenaga Pustaka dan Pustakawan;
- Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota

b. Kelompok Sasaran Urusan Kearsipan

- Masyarakat Pengguna Arsip;
- Instansi Pemerintah, BUMN/D, Swasta,
- Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial Politik Tingkat Provinsi;
- SDM Pengelola Kearsipan / Arsiparis Tingkat Provinsi;
- Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik demi salah satunya *Good Governance*.

Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, diantaranya adalah dengan jalan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan profesional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dasar utama penyusunan perangkat Kabupaten/Kota dalam bentuk organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Paradigma tersebut di atas berimplikasi pada penggabungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagaimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang dijelaskan lebih lanjut bahwa Perpustakaan dan Kearsipan merupakan satu rumpun urusan yang diwadahi dalam Dinas.

Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan berbobot sama strategis maupun urgennya sebagai urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan, perpustakaan memiliki fungsi edukatif, informatif, riset kepentingan, rekrentif, penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan, sedangkan kearsipan memiliki fungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, sebagai alat bukti yang autentik, memori koleksi kolektif dan simpul pemersatu bangsa, referensi sejarah, kepentingan riset.

Sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut di atas perpustakaan, dan kearsipan ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas, peradaban, modern berkarakter serta pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari KKN melalui upaya penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi secara lebih berkualitas, efisien dan efektif. Selain itu Perpustakaan Nasional juga telah menjadi Prioritas Nasional, Perpustakaan Nasional juga telah bertransformasi menjadi layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dimana Perpustakaan Nasional akan mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin

sehingga Perpustakaan dapat menjadi Ruang berbagi Pengalaman, Ruang Belajar yang Konstektual, dan Ruang Berlatih Keterampilan Kerja maka dengan begitu dapat meningkatkan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, dapat meningkatkan jumlah kemitraan dari berbagai lembaga, dan peningkatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Kepala Daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan, disamping itu juga ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -		
				Baseline 2022	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat		Nilai Indeks Literasi Masyarakat (Nilai)	70,98	71,00	72,00
		Meningkatnya kualitas perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Pustaka)	PM	20	20
		Meningkatnya Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	64,23	68,00	70,00

		Masyarakat	Masyarakat di Tingkat Provinsi (Nilai)			
2	Meningkatkan Pengawasan Kearsipan		Nilai pengawasan kearsipan (Nilai)	86,97	90,05	91,00
		Meningkatnya Kualitas Kearsipan	Hasil penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) (Nilai)	90,02	97,05	98,05

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan adalah :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau
2. Pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang Urusan Kepustakaan dan Urusan Kearsipan

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pelayanan publik dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berbentuk aplikasi *Inlislite* untuk perpustakaan, SIKN dan JIKN untuk tata kelola kearsipan berbasis elektronik.

Sejalan dengan hal diatas program dan kegiatan yang telah disusun telah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/Sub Kegiatan Strategis meliputi:

Kebutuhan Pendanaan pada rancangan awal renja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Provinsi Riau tahun 2025 sebedar Rp. 35.512.172.045. dengan ringkasan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 4 (empat)
- Jumlah Kegiatan sebanyak 19 (Sembilan belas)
- Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan)

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tabel T-C.33 permendagri 86 tahun 2017 yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026 PROVINSI RIAU
DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026 PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2025	2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUSTIFIKASI
			TARGET	TARGET	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)		
1.								
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				33.450.250.767	30.765.638.209		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang perpustakaan dan kearsipan	100 Persen	100 Persen	33.450.250.767	30.765.638.209		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	75.000.000		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	75.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dokumen Rencana Kerja
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	1 Laporan	20.766.531.145	21.315.844.626		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/Bulan	116 Orang/Bulan	20.766.531.145	21.315.844.626	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan yang diterima ASN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	1.281.181.494	1.322.118.455		
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	68.000.000	68.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Komponen listrik yang disediakan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2025	2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUSTIFIKASI
			TARGET	TARGET	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)		
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	332.483.539	199.392.455	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - Pembelian Alat pencacah kertas untuk pemusnahan arsip - Laptop 3 Unit - Sinkronkan dengan RKBMD
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	230.834.955	255.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Makanan dan Minuman yang disediakan
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	200.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	449.863.000	599.726.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Terlaksanakan Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi SKPD - rapat kerja dispersip se provinsi riau
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang	350.000.000	625.137.000		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Mebel yang disediakan - Sinkronkan dengan RKBMD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	250.000.000	525.137.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Sarana dan Prasarana yang disediakan - Papan nama soeman HS di drop tahun 2023 karena kena rasionalisasi (2025) - Pengadaan Sapras untuk ruang pameran arsip (2026) - Sinkronkan dengan RKBMD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	3 Jenis	4.341.448.128	4.391.448.128		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.741.448.128	1.741.448.128	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Listrik hanya untuk 5 Bulan Listrik sudah dipenuhi untuk 12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000.000	2.650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyesuaian Honor THL sudah dimasukkan penyesuaian masa kerja
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	6.636.090.000	3.036.090.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	47.790.000	47.790.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2025	2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUSTIFIKASI
			TARGET	TARGET	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	188.300.000	188.300.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kendaraan Dinas Operasioanal dan Lapangan yang dipelihara
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	150.000.000	150.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	6.250.000.000	2.650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Termasuk DAK Fisik 2,5 M - Pengamanan bangunan beresiko bencana (hydrant) (200 Jt) - perbaikan instalasi sanitasi (200 Jt) - relif gedung A dan C perpustakaan soeman hs (200 Jt) - renovasi gedung arsip (3 M)
		Nilai Indeks Literasi Masyarakat	71,00	72,00				
		Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	20	20				
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tingkat Provinsi	68,00	70,00				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.306.018.477	1.001.018.477		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang memperoleh akreditasi	30 Perpustakaan	33 Perpustakaan	1.216.018.477	941.018.477		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	33 Perpustakaan	1.126.018.477	841.018.477	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	24 Perpustakaan	140.000.000	140.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembinaan Perpustakaan sesuai kewenangan sesuai SNP
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	50 Orang	44.040.000	44.040.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tenaga Pustakawan yang ditingkatkan pengetahuannya

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2025	2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUSTIFIKASI
			TARGET	TARGET	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)		
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dikembangkan melalui Peningkatan Koleksi	10 Layanan	10 Layanan	385.738.477	135.738.477	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan Soeman Hs Layanan Perpustakaan deposit Soeman Hs '- sosialisasi kepada penertbit daerah (75 jt) - penyiapan dan pengadaan sapras untuk layanan perpustakaan deposit (125 jt)
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	3500 Eksemplar	456.240.000	421.240.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyediaan Digital perpustakaan Dari kebutuhan koleksi Update koleksi titik baca digital library berapa kebutuhan koelksi.... Standar pengadaan koleksi pustaka 1 tahun 1000 judul masing judul 5 exsemplar (setahun 5000 exsemplar)
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100.000.000	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah elektronik yang dilayanan
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	90.000.000	100.000.000		
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	2 Orang	2 Orang	50.000.000	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penghargaan untuk meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang	2 Orang	40.000.000	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penghargaan untuk meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100 Persen	100 Persen	90.000.000	60.000.000		
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Yang Di Terbitkan	2 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000		
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literasi Sekunder Lainnya yang di terbitkan	650 Entry	650 Entry	20.000.000	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Katalog Induk yang diterbitkan
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	250 Naskah	250 Naskah	20.000.000	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bibliografi Daerah yang diterbitkan
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Yang Dilestarikan	2 Naskah	2 Naskah	50.000.000	20.000.000		
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	60 Eksemplar	25 Eksemplar	50.000.000	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Alihmedia Naskah Kuno di masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2025	2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUSTIFIKASI
			TARGET	TARGET	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)		
		Nilai pengawasan kearsipan	90,50	91,00				
		Hasil penilaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	70,05	75,00				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				755.902.801	919.741.658		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip yang bernilai baik	100 Persen	100 Persen	755.902.801	919.741.658		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis Provinsi Yang Dikelola	100 Persen	100 Persen	70.000.000	70.000.000		
	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2500 Arsip	2500 Arsip	70.000.000	70.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis Daerah Provinsi Yang Dikelola	100 Persen	100 Persen	285.097.568	285.097.568		
	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	600 Arsip	600 Arsip	285.097.568	285.097.568	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip SIKN Tingkat Provinsi	8,3 Persen	15,99 Persen	400.805.233	564.644.090		
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3250 Pengguna	3500 Pengguna	112.333.677	112.333.677	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	288.471.556	452.310.413	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penambahan dari sub kegiatan yg tidak ada disistem Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota) - 80.000.0000 2025 - 127.630.463 2026 Pengawasan Kearsipan di Provinsi - 88.791.606 2025 - 150.000.000 2026
	JUMLAH				35.512.172.045	32.686.398.344		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel dibawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau tahun 2025 - 2026.

Jumlah seluruh Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau di Tahun 2025 adalah sebanyak :

- a. Program Dinas Perpustakaan dan kearsipan berjumlah 4 (Empat) Program, terdiri dari:
 - 1 (satu) Program Penunjang Urusan
 - 3 (tiga) Program Urusan
- b. Kegiatan Dinas Perpustakaan dan kearsipan berjumlah 13 (Tiga belas) Kegiatan
- c. Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan kearsipan berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan/sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.466.230.861,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dengan rincian berdasarkan sumber dana sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 33.012.172.045

Tabel 4.1

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN -
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						30.466.230.861,00							32.686.398.344,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.466.230.861,00							32.686.398.344,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						29.915.941.931,00							31.766.656.686,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administarsi Perkantoran Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan	100 Persen			100 Persen	28.605.015.333,00						100 Persen	30.765.638.209,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen			3 Dokumen	52.207.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			3 Dokumen	52.207.700,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	18.173.416.354,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Laporan	21.315.844.626,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	232 Orang/ Bulan			116 Orang/ Bulan	18.173.416.354,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	116 Orang/ Bulan	21.315.844.626,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN

	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	8 Layanan			4 Layanan	1.370.712.603,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	4 Layanan	1.322.118.455,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	68.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	68.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	408.614.088,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	199.392.455,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	230.834.955,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	199.999.560,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	463.264.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Laporan	599.726.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN

	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	36 Jenis Barang			18 Jenis Barang	349.755.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	18 JenisBarang	625.137.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	99.755.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit			10 Unit	250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	10 Unit	525.137.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	6 Jenis			3 Jenis	4.872.963.676,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3 Jenis	4.391.448.128,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan			5 Laporan	2.241.448.116,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	5 Laporan	1.741.448.128,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	2.631.515.560,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	12 Laporan	2.650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN

	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8 Jenis			4 Jenis	3.785.960.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	4 Jenis	3.036.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			1 Unit	47.790.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Unit	47.790.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit			7 Unit	188.300.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	12 Unit	188.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit			47 Unit	299.870.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	38 Unit	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	3.250.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Unit	2.650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi	30 Pustaka			30 Pustaka	1.220.955.472,00						30 Pustaka	941.018.477,00	

	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Perpustakaan Khusus yang dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan</i>	63 Perpustakaan			30 Perpustakaan	1.130.956.749,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	33 Perpustakaan	841.018.477,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	48 Perpustakaan			24 Perpustakaan	139.999.992,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	24 Perpustakaan	140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang			50 Orang	30.507.953,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	50 Orang	44.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	20 Layanan			10 Layanan	404.217.713,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	10 Layanan	135.738.477,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	7500 Eksemplar			4000 Eksemplar	456.239.960,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	3500 Eksemplar	421.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan			1 Perpustakaan	99.991.131,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	1 Perpustakaan	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen			100 Persen	89.998.723,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	100 Persen	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	4 Orang			2 Orang	49.999.721,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Orang	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	4 Orang			2 Orang	39.999.002,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Orang	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi	100 Persen			100 Persen	89.971.126,00						100 Persen	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Yang Di Terbitkan	4 Paket			2 Paket	39.985.430,00			Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Paket	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1300 Entry			650 Entry	19.992.715,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	650 Entry	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan</i>	500 Naskah			250 Naskah	19.992.715,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	250 Naskah	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	<i>Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Yang Dilestarikan</i>	4 Naskah			2 Naskah	49.985.696,00			Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	2 Naskah	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	85 Eksemplar			60 Eksemplar	49.985.696,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Pemustaka	25 Eksemplar	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						550.288.930,00							919.741.658,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik	100 Persen			100 Persen	550.288.930,00						100 Persen	919.741.658,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis Provinsi Yang Dikelola	100 Persen			100 Persen	39.699.927,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasripan Daerah dan OPD	100 Persen	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Daftar Arsip Dinamis</i>	5500 Arsip			2500 Arsip	39.699.927,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	3000 Arsip	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	<i>Persentase Arsip Statis Daerah Provinsi Yang Dikelola</i>	100 Persen			100 Persen	269.050.830,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	100 Persen	285.097.568,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			<i>Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi</i>	1200 Arsip			600 Arsip	269.050.830,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Keasrian Daerah dan OPD	600 Arsip	285.097.568,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN

	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip SIKN Tingkat Provinsi	15,99 Persen			8,30 Persen	241.538.173,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Kearsipan Daerah dan OPD	15,99 Persen	564.644.090,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	6250 Pengguna			3250 Pengguna	21.006.532,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Kearsipan Daerah dan OPD	3500 Pengguna	112.333.677,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	2 Laporan			1 Laporan	220.531.641,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Kearsipan Daerah dan OPD	1 Laporan	452.310.413,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	JUMLAH							30.466.230.861,00							32.686.398.344,00	

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program / kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Renja Tahun 2025 ini maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat diusulkan kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan/sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan perpustakaan dan kearsipan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
2. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan Renja PD ini sesuai dengan yang termuat di dalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan strategis Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau.
3. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau berkewajiban menjamin konsistensi pencapaian target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Renja Tahun 2025 dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), selanjutnya RKA juga sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pagu anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif, dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 selain mengacu pada Renja ini disusun berdasarkan standar biaya, standar akuntansi pemerintah, dan kebijakan penganggaran pemerintah.

Pekanbaru, Juli 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. Hj. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 462 Telp./Fax. (0761) 34068

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26613

PEKANBARU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts.000.7 / Dipersip / 1.1 / 34

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode RPJMD Berakhir pada tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 20005 – 2025;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025, sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025, sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
 2. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana 4 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;

3. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2025.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 000.7 / DIPERSIP / 1.1 / 34
Tanggal : 30 Desember 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dipersip Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dipersip Provinsi Riau	Ketua Tim
	Kabid Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Koordinator Bidang
3.	Ketua Tim Pendayagunaan dan Perlindungan Akses Arsip	Anggota
4.	Ketua Tim Pembinaan Kearsipan	Anggota
5.	Ketua Tim Layanan Informasi dan Jasa Kearsipan	Anggota
6.	Winarno Hamiseno,A.Ks,M.Si	Anggota
	Kabid Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Koordinator Bidang
7.	Ketua Tim Akuisisi Arsip	Anggota
8.	Ketua Tim Pengolahan Arsip	Anggota
9.	Ketua Tim Penyimpanan dan Perawatan Arsip	Anggota
10.	H. Khairiansyah,S.Pd.	Anggota
11.	Ramli Arsyad, SE, ME	Anggota
12.	Tri Amriaty,S.Si	Anggota
	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator Bidang
13.	Ketua Tim Deposit, Akuisisi, Pengolahan Koleksi Perpustakaan	Anggota
14.	Ketua Tim Otomasi, Preservasi, Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan	Anggota
15.	Ketua Tim Pembinaan dan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Minat Baca	Anggota
16.	Muzakir	Anggota
17.	Dodi Prayitno,S.IP	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi & Informasi Perpustakaan	Koordinator Bidang
18.	Ketua Tim Pelayanan Perpustakaan	Anggota
19.	Ketua Tim Informasi Perpustakaan	Anggota
20.	Ketua Tim Dokumentasi	Anggota
21.	Kun Wardoyo, S.Sos,M.Si	Anggota
22.	Sarmiyati,S.IP	Anggota
	Sekretariat	
23.	Ketua Tim Perencanaan Program	Koordinator
24.	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Anggota
25.	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Anggota
26.	Sisilia Wedhia Wati,S.Sos	Anggota
27.	Karmiyenti, SKM	Anggota
28.	Gusriandi Nanda Putra, S.T	Anggota
29.	Hamdani Dalimunthe	Anggota
30.	Raja Penta Indika, S.Sos	Anggota
31.	Fira Riona Purnama, SE	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,

Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Riau
Nomor : Kpts.000.7 / D1PERSIP/1.1/34
Tanggal : 30 Desember 2023

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO.	URAIAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Desember 2023
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja	Januari 2024
3.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja	Februari 2024
4.	Penyusunan Rancangan Renja	Maret 2024
5.	Penyusunan Rancangan Akhir Renja	Mei 2024
6.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juni 2024

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001

MATRIKS VERIFIKASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2025

Dinas : Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	COVER	JUDUL COVER : "RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU"	-	V	-	-
2	PERGUB PENETAPAN	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2025	-	V	-	-
3	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	-	V	-	-
4	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	-	V	-	-
5	BAB I PENDAHULUAN					
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	-	V	-	-
	1.2. Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	-	V	-	-
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	V	-	-
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	-	V	-	-
6	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023					
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	-	V	-	-
		2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	-	V	-	-
		2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	-	V	-	-
		2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	-	V	-	-
		2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan	-	V	-	-
		2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.29	-	V	-	-
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.30	-	V	-	-

Dinas : Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;	-	V	-	-
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;	-	V	-	-
		Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>);	-	V	-	-
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan	-	V	-	-
		Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	-	V	-	-
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;	-	V	-	-
		Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;	-	V	-	-
		Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.31	-	V	-	-
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya;	-	V	-	-
		Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.32	-	V	-	-
	2.6. Kelompok Sasaran Layanan	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)	-	V	-	-
7 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	-	V	-	-
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	-	V	-	-
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan.	-	V	-	-
		Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan	-	V	-	-
		Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.33	-	V	-	-

Dinas : Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
8	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	<i>Diambil dari SIPD (sesuai tahapan)</i>	-	V	-	
9	BAB V PENUTUP	1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.	-	V	-	-
		2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.	-	V	-	-
		3. Rencana tindak lanjut.	-	V	-	-
		4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.	-	V	-	-
10	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 2. Formulasi dan perhitungan target indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu	-	V	-	-

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

1. AGUSALIM, S.Sos, M.Si

2. INDA MARILAWATI, S.Sos

3. SISILIA WEDHIAWATI, S.Sos

4. R. PENTA INDIKA, S.Sos

Pekanbaru, Juli 2024

Verifikator :

1. RAJA JUARISMAN, ST, M.Si

2. DINI GUSTIZA, SE

3. MUHAMMAD IKHSAN, S,IP

4 MAYHAYATI, ST